

Assalammualaikum Bapak Ibu Semua,  
Silahkan upload tugas Mid semester disini.  
terima kasih

# **Informasi Tata Kelola Teknologi Informasi**

## **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **1. Pendahuluan**

Teknologi informasi adalah salah satu dari jenis teknologi yang berbentuk peralatan teknis dan berfungsi untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi termasuk serangkaian peralatan yang berfungsi sebagai alat untuk memproses data atau informasi, alat bantu, alat manipulasi, dan alat pengelolaan informasi. Teknologi informasi di era globalisasi ini mengalami perubahan yang sangat cepat, hal tersebut ditandai dengan peralatan teknologi yang semakin canggih dan jangkauan yang lebih luas. Dengan kemajuan teknologi informasi maka kegiatan yang dilakukan oleh manusia dapat terselesaikan secara lebih efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mengakibatkan pola perkembangan dan kemajuan di bidang perkantoran akan menjadi lebih baik.

Kemajuan teknologi khususnya di bidang elektronika membawa kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas perkantoran. Pekerjaan yang dulunya dikerjakan secara manual sehingga penyelesaian pekerjaan membutuhkan waktu yang relatif lama dengan tingkat akurasi yang rendah kini dengan berkembangnya teknologi komputer hal tersebut bisa diperbaiki. Pemanfaatan atau implementasi teknologi informasi merupakan sarana penunjang/pendorong bagi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara efektif jika anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Selain itu implementasi atau pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif yang secara umum adalah terjadi efisiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian secara optimal juga harus diperhatikan, agar semua perangkat teknologi informasi bersifat multi fungsi sehingga dalam pengembangan selanjutnya diupayakan terjadi integrasi perangkat.

## **2. Tinjauan Literatur**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah lembaga daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Dalam upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui aspek penguatan kelembagaan.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda sebagai bagian dari organ yang membantu tugas Bupati pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan bergulirnya Era Otonomi Daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, berdampak terhadap struktur kelembagaan perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai akibat adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, maka diterbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No.165). Bappeda merupakan lembaga non departemen yang langsung di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, Bappeda merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

### 3. Konsep Pengukuran

Konsep ini terdiri dari empat aspek, aspek-aspek tersebut akan dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel I. Aspek Tata Kelola TI

No.	Aspek	Informasi	Keterangan
1	Perencanaan dan Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana Induk Strategis TI (RENSTRA TI)</li><li>• Dokumen Perencanaan TI</li><li>• Unit e-government</li><li>• Cetak Biru</li><li>• Dokumen Arsitektur</li><li>• Standar Jenis Aplikasi</li><li>• Metodologi dan Mekanisme Standar</li><li>• Metode Pengukuran dan Analisis Biaya-Manfaat</li><li>• Sosialisasi dan Pendidikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum Ada</li><li>• Belum Ada</li></ul>
2	Pengadaan dan Pengembangan IT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Situs web (e-procurement)</li><li>• Pendanaan</li><li>• Anggaran</li><li>• Perangkat Lunak dan Produk Legal</li><li>• Tim IT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum Ada</li><li>• Belum Ada</li><li>• Belum Ada</li><li>• Belum Ada</li><li>• Belum Ada</li></ul>
3	Implementasi dan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infrastruktur yang redundan</li><li>• Pusat Data</li><li>• Manajemen aset</li><li>• Manajemen keamanan informasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum Ada</li><li>• Belum Ada</li><li>• Belum Ada</li><li>• Belum Ada</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen meja bantuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Ada</li> </ul>
4	Kontrol dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur audit kinerja</li> <li>• Prosedur penghargaan</li> <li>• Persaingan e-government</li> <li>• Penghargaan e-government</li> <li>• Peringkat e-government</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Ada</li> </ul>

Berdasarkan penilaian terhadap empat aspek yaitu aspek perencanaan dan pengorganisasian, aspek pengadaan dan pengembangan, aspek pelaksanaan dan pengelolaan dan aspek pengawasan dan pengembangan dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek tersebut masih kurang terpenuhi dikarenakan masih banyak aspek yang belum ada. Selain itu tidak terlihat persentase aspek pengadaan dan pengembangan IT dan tidak adanya mempekerjakan tenaga ahli dari industri atau perguruan tinggi untuk menyiapkan kebutuhan IT dan komunikasi di OPD.

Aspek implementasi dan manajemen tata kelola TI. Temuan menunjukkan OPD tidak memiliki sistem cadangan, help desk dan pusat data dalam operasional pelayanan publiknya sehingga berdasarkan temuan tersebut OPD perlu mengadakan dan meningkatkan kapasitas penerapan dan pengelolaan TI-nya. Dari segi mekanisme reward, temuan juga menunjukkan tidak terdapat memiliki prosedur reward bagi yang berhasil membangun dan mengimplementasikan TI serta memberikan sanksi bagi yang melanggar tata kelola TI.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai informasi tata kelola teknologi informasi OPD dapat disimpulkan pada aspek perencanaan dan pengorganisasian menunjukkan bahwa dari segi planning masih kurang ada penerapannya, begitu juga dari segi pengorganisasian dan untuk pengembangan di lingkungan tata kelola. Pada aspek pengadaan dan pengembangan juga menunjukkan belum ada aspek pengadaan dan pengembangan sehingga OPD harus memperhatikan investasi dan sumber daya operasional untuk meningkatkan informasi tata kelola di lingkungan pemerintahan. Pada aspek implementasi dan pengelolaan menunjukkan bahwa dari aspek implementasi dan pengelolaan masih belum diterapkan.